

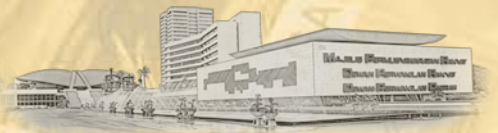


BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 769/V/2013

I/MEI 2013



Komisi X Desak Mendikbud Evaluasi Menyeluruh UN 2013

KEGIATAN DPR-RI MINGGU PERTAMA MEI 2013

Kegiatan AKD DPR-RI minggu pertama bulan Mei 2013, antara lain adalah kunjungan kerja ke daerah di Masa Reses Masa Persidangan III. Namun Komisi X DPR-RI, meskipun reses, tetap memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendengarkan laporan tentang “kekisruhan” penyelenggaraan Ujian Nasional. Berikut poin-poin kegiatan minggu pertama Mei 2013.

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie

Kegiatan Bidang Legislasi

Dalam Masa Reses Persidangan III ini, dievaluasi berbagai RUU yang segera mendapatkan prioritas dalam penanganan untuk diselesaikan/dilanjutkan dalam Masa Persidangan IV, yaitu sejumlah 19 RUU. Diantaranya RUU tentang Aparatur Sipil Negara, RUU tentang Pemilukada, RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar, RUU tentang Keantariksaan, RUU tentang Jaminan Produk Halal, RUU tentang Pendidikan Kedokteran, RUU tentang Piutang Negara dan Piutang Daerah, RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, RUU tentang Pemerintah Daerah, RUU tentang Desa, RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, dan lain-lain.

Ada beberapa RUU yang langsung menyentuh kepada kepentingan rakyat, diantaranya RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan, dan RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani direncanakan selesai pada bulan Mei. RUU ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melindungi eksistensi petani Indonesia, tidak hanya dalam tataran nasional, tetapi juga internasional. Perlindungan petani diejawantahkan dalam bentuk kebijakan dan regulasi yang tetap memperhatikan koridor kesepakatan dalam *World Trade Organization* yang



telah diratifikasi dalam UU No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Tujuan dari penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani untuk: [1] meningkatkan kemandirian dan kedaulatan petani dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik, [2] melindungi petani dari kegagalan panen dan resiko, [3] menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani, [4] menumbuh-kembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani, [5] meningkatkan kemampuan dan kepastian petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan, [6] memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani.

Disamping itu, dalam Masa Sidang IV akan dilanjutkan pembahasan terhadap RUU KUHP dan RUU KUHP, sekaligus pembahasan tentang RUU Perubahan Atas UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan RUU tentang Mahkamah Agung.

Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran pada Masa Sidang IV, DPR akan melakukan pembahasan dalam bentuk Pembicaraan Pendahuluan dan Rencana Kerja Pemerintah dalam

rangka penyusunan RAPBN TA 2004. Sesuai dengan UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), serta UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan akan menyampaikan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dan Kerangka Ekonomi Makro (PPKF-KEM) pada tanggal 20 Mei 2013.

APBN sebagai instrumen kebijakan ekonomi dimaksudkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam pembahasan penyusunan RAPBN ini, DPR bersama Pemerintah akan menetapkan kebijakan umum dan prioritas anggaran sebagai acuan bagi setiap kementerian/lembaga di dalam menyusun anggarannya. Pembahasan RAPBN kali ini menjadi penting ketika menghadapi agenda politik yaitu Pemilihan Umum pada tahun 2014 mendatang. Sesuai dengan Siklus APBN, dalam Masa Sidang IV Pemerintah juga akan menyampaikan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN tahun anggaran 2013.

Selain membahas tentang kebijakan asumsi makro, pendapatan dan pembiayaan serta kebijakan belanja dan transfer ke daerah untuk APBN TA 2014, kebijakan APBN yang akan ditetapkan pada tahun ini dapat memberi ruang gerak kebijakan bagi pemerintahan baru yang akan terpilih pada tahun depan untuk mengimplementasikan visi, misi dan strateginya dalam membangun bangsa.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Rapat Kerja Komisi X DPR-RI dengan Mendikbud, Jumat 26 April 2013 (dalam Masa Reses), dengan agenda pembahasan mengenai pelaksanaan Ujian Nasional (UN), memutuskan, diantaranya: [1] terhadap pelaksanaan UN SMA sederajat tahun 2013, Komisi X bersikap menyayangkan pelaksanaan UN

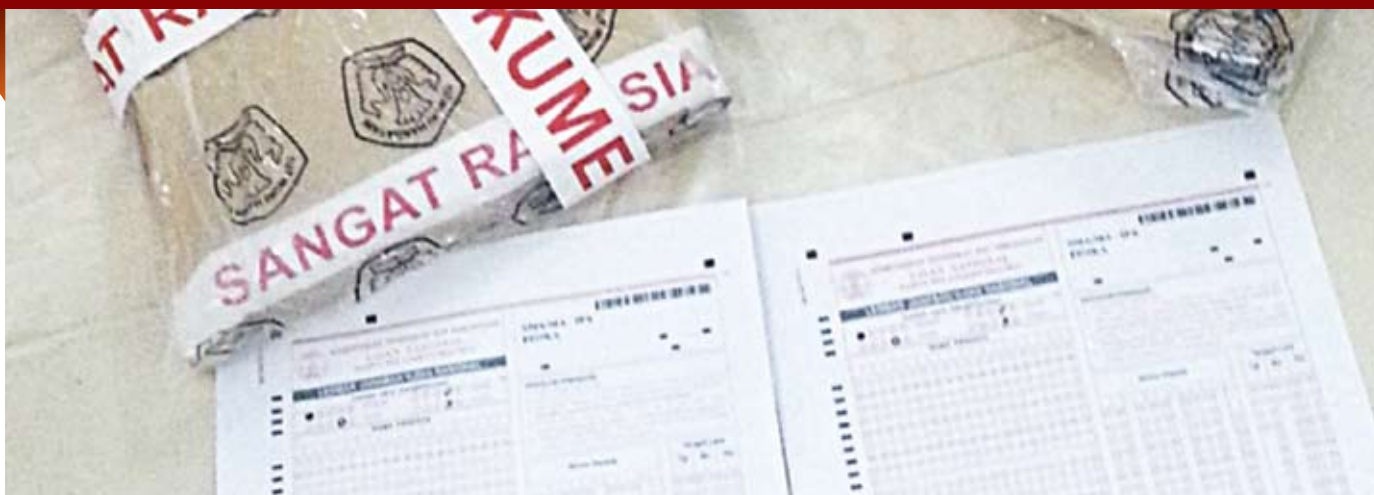
SMA sederajat tahun 2013 yang tidak dilaksanakan secara serentak di seluruh daerah, sehingga berpotensi melahirkan ketidakadilan, memberikan dampak psikologis terhadap peserta ujian dan implikasi anggaran. Hasil UN SMA sederajat tahun 2013 yang akan dijadikan sebagai syarat kelulusan dan persyaratan masuk Perguruan Tinggi Negeri, perlu dipertimbangkan kembali dengan kajian mendalam. [2] Komisi X DPR-RI mendesak Mendikbud untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan mengambil langkah tegas terhadap pengambil kebijakan, pelaksana, dan pengawas pengadaan dan distribusi naskah UN 2013; segera menyelesaikan investigasi proses pelaksanaan pengadaan naskah UN tahun 2013 dan menyerahkan hasil investigasi tersebut secara resmi kepada Komisi X DPR-RI; menyampaikan laporan pelaksanaan dan evaluasi UN tahun 2013 setiap jenjang pendidikan (kecuali sekolah dasar dan sederajat) secara komprehensif, paling lambat satu bulan setelah seluruh pelaksanaan UN tahun 2013 selesai. [3] Komisi X DPR-RI mendesak Mendikbud untuk meninjau kembali PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, utamanya terkait dengan tugas, wewenang dan peran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dalam menyelenggarakan UN. [4] Dalam rangka pengawasan, evaluasi pelaksanaan UN tahun 2013 dan landasan pengambilan kebijakan UN tahun 2014, Komisi X dan Kemdikbud sepakat untuk membentuk Panja Evaluasi Pelaksanaan UN tahun 2013.

Diplomasi Parlemen

Ketua DPR-RI memimpin Delegasi Kunjungan Muhibah ke tiga negara Eropa, yakni Kerajaan Denmark, Republik Lithuania, dan Republik Belarus, dari tanggal 28 April-7 Mei 2013. Maksud dari kunjungan adalah untuk memenuhi undangan dari pihak parlemen ketiga negara pengundang, dan untuk mengembangkan kerjasama antar parlemen dalam rangka peningkatan hubungan persahabatan di antara Indonesia dan ketiga negara Eropa tersebut.**



Komisi X Desak Mendikbud Evaluasi Menyeluruh UN 2013



Tumpukan soal Ujian Negara (UN) Tahun 2013.

Komisi X DPR memberi perhatian khusus atas karut marut Ujian Nasional 2013, dengan memanggil Mendikbud M. Nuh dan jajarannya pada Jumat (26/4) lalu. Kepedulian yang tinggi Komisi bidang pendidikan ini terlihat bahwa raker tersebut digelar pada masa reses, beberapa hari setelah pelaksanaan UN tingkat SLTA yang digelar mulai tanggal 22 April 2013.

Ketua Komisi X Agus Hermanto saat membuka raker mengatakan, sebenarnya acara ini sudah direncanakan sejak minggu lalu, mulai Kamis lalu ditunda Jumat seharusnya malam ditunda siang hari. "Beberapa komentar yang menyebut Komisi X tidak merespon UN, rasanya tidak benar. Dalam raker ini mohon Pak Menteri sampaikan bahwa raker sudah dirancang minggu lalu, tetapi masih di luar kota akhirnya ditunda," katanya.

Mengawali paparannya, Mendikbud mengatakan kalau ada pejabat yang mengatakan Komisi X anteng-anteng saja, tidak perlu kita hiraukan. "Kami tahu betul, kita sedang bekerja baik Komisi X maupun Kemendikbud sedang memantau UN ke beberapa daerah," tegas M. Nuh.

Lebih lanjut dia menyatakan, pihaknya meminta maaf yang sebesar-besarnya atas musibah karena ada 1 dari 6 percetakan naskah ujian SMA tidak bisa menuntaskan sebagaimana dalam kontrak, akibatnya 11 provinsi tidak bisa melaksanakan UN serentak.

"Bukan hanya 11 propinsi yang tidak bisa UN serentak, tapi rentetannya luar biasa, karena itu atas nama Kementerian sebagai penanggungjawab bersama BSNP menyampaikan permohonan maaf," ungkap dia.

Dalam salah satu kesimpulannya, raker yang berjalan alot dari Jumat pukul 14.30 hingga dini hari Sabtu (27/4), DPR bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh sepakat untuk mengkaji lebih dalam apakah hasil ujian

nasional tahun ini tetap akan dipakai untuk persyaratan kelulusan siswa. Kesepakatan sebagai hasil rapat dengar pendapat Komisi X DPR dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini diambil menyusul terlambatnya pelaksanaan ujian nasional tingkat SMA di 11 provinsi.

"Hasil UN SMA dan sederajat tahun 2013 yang akan dijadikan sebagai syarat kelulusan dan persyaratan masuk perguruan tinggi negeri perlu dipertimbangkan kembali dengan kajian mendalam," ujar Ketua Komisi X Agus Hermanto, saat membacakan kesimpulan raker.

Tidak serentaknya penyelenggaraan ujian nasional tahun ini juga sangat disesali karena berpotensi melahirkan ketidakadilan, mem-



Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto didampingi Wakil Ketua Komisi X Syamsul Bachri berjabat tangan dengan Mendikbud M. Nuh saat Raker Jum'at (26/4).

berikan dampak psikologi yang negatif pada para peserta ujian, serta memunculkan implikasi anggaran.

Agus melanjutkan, Komisi X mendesak Mendikbud untuk benar-benar

melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil langkah tegas terhadap pengambil kebijakan, pelaksana, dan pengawas pengadaan dan distribusi naskah ujian nasional 2013. Menteri diminta pula segera menyelesaikan

investigasi proses pelaksanaan pengadaan naskah ujian tersebut untuk kemudian hasilnya diserahkan pula ke Komisi X DPR.

“Mendikbud juga didesak menyampaikan laporan pelaksanaan dan evaluasi UN Tahun 2013 setiap jenjang pendidikan (kecuali SD dan sederajat) secara komprehensif, paling lambat satu bulan setelah seluruh pelaksanaan UN tahun 2013 selesai,” imbuh Agus. Dalam rangka pengawasan, lanjut politisi dari Partai Demokrat ini, Komisi X dan Kemendikbud sepakat membentuk Panja Evaluasi Pelaksanaan UN Tahun 2013.

Dalam rapat yang sama, Komisi X DPR mendesak Mendikbud meninjau kembali PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peninjauan ulang yang diminta terutama terkait dengan tugas, wewenang, dan peran BSNP dalam menyelenggarakan UN. (mp, sf) Foto: wy/parle.

Komisi VII Tinjau Pertambangan Emas Ilegal di Solok Selatan, Sumbar

Komisi VII DPR RI dipimpin langsung Ketuaanya Sutan Bathoegana Kamis (2/5) pagi bertolak dari Jakarta menuju Sumatera Barat untuk mengunjungi Kabupaten Solok Selatan untuk meninjau langsung aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di daerah itu.

Tim Komisi VII berjumlah 13 orang dijadwalkan menuju kantor Gubernur selanjutnya bersama-sama ke lokasi penambangan emas Solok Selatan.

“Komisi VII yang datang langsung dipimpin oleh Ketua Komisi VII Sutan Bathoegana dan didampingi dari provinsi oleh Gubernur beserta rombongan,” ungkap Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria.

Berdasarkan penjelasan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria di Padang Aro, Tim Komisi VII DPR-RI akan langsung meninjau lokasi pertambangan emas ilegal di Nagari Lubuak Ulang Aling, Kecamatan Sangir Batanghari.

“Komisi VII DPR-RI berangkat pada Kamis pagi dari Jakarta dan langsung menuju Solok Selatan guna meninjau langsung lokasi penambangan ilegal di daerah itu,” katanya.

Dia mengatakan, kunjungan ke lokasi penambangan di Lubuak Ulang Aling karena hanya lokasi tersebut yang bisa dijangkau dengan kendaraan roda empat.

Sedangkan di kawasan lain seperti Pinti Kayu tidak bisa dilewati hanya

dengan kendaraan bermotor, tetapi juga harus berjalan kaki dengan jarak yang cukup jauh atau memakai jalur air menggunakan perahu mesin tempel.

Dia menyebutkan, aktivitas penambangan emas ilegal di Solok Selatan



Ketua Komisi VII DPR Sutan Bathoegana.

sudah berlangsung lebih kurang tiga tahun terakhir di sepanjang aliran Sungai Batanghari. Akibat aktivitas liar tersebut, bukan saja merugikan daerah dan negara, tetapi juga telah merusak lingkungan.

“Bahkan akibat aktivitas penambangan emas ilegal itu juga merenggut korban jiwa para penambang tersebut,” ujarnya.

Dijelaskan Bupati Muzni Zakaria, untuk mencapai lokasi tambang ilegal ini harus menggunakan mobil *double garden* karena sulitnya medan, kemudian dilanjutkan dengan naik kendaraan

air yakni *timpek*. Sementara dari ibukota kabupaten, Padang Aro, menuju Lubuak Ulang Aling jika menggunakan mobil ditempuh sekitar 3 jam. (*) Foto: doc/parle.

Hemat Anggaran Tanpa Menaikkan Harga BBM



Anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait.

Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait mengatakan sebaiknya pemerintah melakukan penghematan anggaran tanpa menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, melainkan dengan menghemat anggaran negara.

“Sebaiknya harga BBM tidak naik. Masih ada cara lain untuk menghemat anggaran negara misalnya dengan meningkatkan efisiensi perjalanan dinas kementerian/lembaga dan bea masuk sektor pertambangan seperti batu bara,” kata Maruarar saat dihubungi di Jakarta, Rabu (1/5).

Hal itu dikatakannya menanggapi rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Semula dua skenario telah disiapkan yaitu menerapkan dua harga BBM bersubsidi, untuk sepeda motor dan angkutan umum tidak ada kenaikan harga atau tetap Rp 4.500/liter sedangkan untuk mobil pribadi harga BBM jenis premium dinaikkan menjadi

Rp 6.500/liter.

Namun rencana itu tidak jadi dilaksanakan, kemudian mengambil opsi satu harga dibawah Rp 6.500/liter tetapi baru akan diputuskan setelah diajukannya RAPBN Perubahan tahun 2013 kepada DPR.

Menurut Maruarar, jebolnya anggaran negara akibat subsidi BBM diperkirakan akan mencapai Rp30 triliun (kelebihan kuota BBM enam juta kiloliter), apabila tidak ada kebijakan pengendalian BBM bersubsidi.

Dengan melakukan peningkatan bea masuk sektor pertambangan batu bara, menurut dia potensi pendapatan negara bisa mencapai Rp 48 triliun.

“Harus ada langkah instrumen fiskal untuk meningkatkan penerimaan negara. Peningkatan bea masuk dan efisiensi perjalanan dinas kementerian/lembaga itu bisa menutupi jebolnya anggaran akibat BBM, apalagi menurut audit Badan Pemeriksa Keuangan memang ada pemborosan di sektor itu,” ungkap dia.

Dia mengatakan Fraksi PDIP tidak sekedar menolak kenaikan harga BBM yang digulirkan pemerintah. Namun tetap memberikan solusi langkah lain penghematan anggaran.

Sejauh ini pemerintah tidak menyatakan akan membatalkan rencana kenaikan BBM bersubsidi. Pemerintah hanya melakukan penundaan kenaikan

hingga pembahasan APBNP 2013, agar bisa memberikan kompensasi kepada masyarakat.

“BBM akan dinaikkan bila dana kompensasi sudah siap,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, Selasa (30/4) lalu.

Kepala Negara mengatakan pemerintah menginginkan ketika berlaku harga BBM subsidi yang baru maka kompensasi bagi masyarakat miskin dapat langsung disalurkan sehingga tidak ada jeda waktu.

“Tidak boleh ada gap waktu, maka tergantung dana kompensasi siap, pemerintah sudah menyiapkan rencananya. Rencana kami apa saja, berapa lama, akan segera disampaikan ke DPR dalam bentuk RAPBN-P 2013,” kata Presiden.

Kepala Negara mengharapkan pembahasan RAPBN-P 2013 dengan DPR dapat selesai pada Mei mendatang sehingga dana kompensasi sudah tersedia dan kenaikan harga BBM bersubsidi akan diberlakukan.

Pemerintah dalam APBN 2013 memberikan pagu belanja subsidi energi sebesar Rp274,7 triliun dengan perincian subsidi listrik Rp 80,9 triliun dan subsidi BBM Rp 193,8 triliun dengan volume sebesar 46 juta kiloliter.

Kuota volume BBM bersubsidi diprediksi dapat mencapai 53 juta kiloliter dan mengganggu fiskal, apabila tidak ada kebijakan yang memadai untuk mengendalikan konsumsi BBM, yang jumlahnya semakin meningkat setiap tahun. (*) Foto: doc/parle.

Komisi X Tak Pernah Menahan Anggaran UN



Anggota Komisi X Zulfadhli.

Anggota Komisi X Zulfadhli merasa geram dengan isu yang beredar bahwa

kekacauan Ujian Nasional SMA dan sederajat tahun 2013, disebabkan karena DPR telah menahan anggaran.

“Selama ini ada kesan di publik bahwa Komisi X yang menahan anggaran. Tapi yang sebenarnya terjadi, kami tidak pernah menunda anggaran untuk program Kemendikbud selaku mitra kerja,” tandas Zulfadhli ketika rapat kerja dengan Kemendikbud di Gedung Nusantara I, baru-baru ini.

Politisi Golkar ini menyatakan bahkan Komisi X menyetujui usulan tambahan anggaran UN sebesar Rp 100 miliar pada raker dengan Mendikbud Desember 2011 lalu, dengan pertimbangan jumlah peserta serta varian soal yang bertambah.

“Di sini, yang menghambat adalah dari pemerintah sendiri, yaitu Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Padahal DPR sudah memutuskan pada Januari 2013. Tapi Menkeu masih ngotot melakukan blokir,” imbuh Zulfadhli

Yang lebih membuat kesal Zulfadhli lagi, Menkeu tetap tak mau membuka blokir bagi Kemendikbud, meski sudah membawa rekomendasi dari Komisi X untuk memprioritaskan anggaran pelaksanaan Ujian Nasional 2013.

“Hal ini juga perlu diinvestigasi oleh Pemerintah kenapa sampai Menkeu bertindak seperti itu,” tegasnya. (sf)
Foto: od/parle.

Lembar Jawaban UN Tipis Rugikan Siswa



Tim Kunker Komisi X DPR dipimpin Ketua Komisi X Agus Hermanto saat menerima keluhan dari beberapa Kepala Sekolah di Provinsi Maluku Utara.

Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR menerima keluhan dari beberapa Kepala Sekolah di Provinsi Maluku Utara bahwa lembar jawaban siswa pada Ujian Nasional (UN) berkualitas rendah atau tipis, menyebabkan siswa mengalami kesulitan. “Jika tidak hati-hati saat hapus, atau terkena keringat mudah robek atau rusak, ini merugikan siswa,” kata Ketua Komisi X Agus Hermanto.

Tim yang dipimpin Ketua Agus Hermanto, mengunjungi SMPN 2 Ternate, SMAN 1 Ternate, SMPN 1 Tidore, SMAN 1 Tidore. Komisi X menginginkan dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan Ujian Nasional, pelaksanaan Ujian Nasional evaluasi UN untuk mengetahui hasil sistem mutu pendidikan, dinilai kacau. “Harus segera dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan UN,” tegas Agus Hermanto baru-baru ini.

Sejak dilaksanakan pada tahun 2005, kata politisi Partai Demokrat ini, UN banyak permasalahan yang muncul. Misalnya UN diwarnai kebocoran soal, soal yang tertukar, atau kualitas kertas yang tipis. Karena itu dia berharap, permasalahan yang muncul sebelum ini jangan sampai terulang lagi.

Meski mulai tahun ini bobot untuk menentukan kelulusan dipangkas 60%, dan 40% dari ujian sekolah, UN tetap terjadi perdepatan panjang. UN kian amburadul setelah pelaksanaan untuk tingkat SMU di sejumlah daerah tertunda karena keterlambatan pendistribusian naskah soal.

Agus menekankan bahwa harus ada penilaian terhadap mutu pendidikan dan evaluasi UN dimaksudkan untuk melihat sisi positif maupun negatif bagi sistem pendidikan di Indonesia. “Jika dinilai tidak efektif, perlu dibuatkan metode yang terdesentralisasi yang lebih mengandalkan pada sistem teknologi,” tegasnya.

GOR Rusak Berat

Komisi yang membidangi pendidikan dan olah raga serta pariwisata ini menyatakan prihatin dengan sarana olah raga di Provinsi Maluku Utara. Tim Komisi X saat mengunjungi gelanggang olah raga (GOR) stadion Pulau Ternate dan Pulau Tidore kondisinya rusak berat. Agus Hermanto mengatakan Maluku Utara perlu fasilitas dan sarana serta prasarana olah raga yang layak, untuk menciptakan olah ragawan yang

berprestasi.

“Stadion sepak bola di Maluku Utara sangat memprihatinkan, padahal kedua GOR tersebut sering digunakan dalam kegiatan turnamen sepakbola,” komentar Agus.

Seusai mendarat di Kota Ternate Kepulauan, Tim Komisi X kemudian melanjutkan perjalanan dan menyeberang menggunakan *speedboat* singgah di Ibukota Provinsi Maluku Sofifi

yang telah dimekarkan lebih dari sepuluh tahun lalu. Dalam kesempatan ini Komisi X mendapatkan masukan mengenai pengembangan pembangunan ibukota provinsi Sofifi.

“Pemerintah Daerah Provinsi Maluku belum mampu untuk membangun sarana dan prasarana olah raga, untuk itu perlu perhatian khusus dari Pemerintah Pusat,” kata Agus menambahkan. (as)

RUU Pertanahan Harus Mampu Menjadi Solusi Konflik Tanah



Anggota Komisi II DPR Zainun Ahmadi dalam acara Forum Legislasi di Press Room DPR.

Anggota Komisi II DPR Zainun Ahmadi menyatakan Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan harus bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan berbagai konflik pertanahan atau konflik agraria.

Menurut Zainun, RUU Pertanahan harus secara tegas memuat tiga hal pokok, yakni kepastian hak atas tanah, perencanaan penggunaan tanah, serta pengakuan dan penghormatan negara atas hukum adat terkait dengan penguasaan dan kepemilikan tanah ulayat atau adat, maupun tanah yang menjadi waris turun temurun secara adat.

“RUU Pertanahan ini kelak harus menjadi solusi atas konflik agraria atau konflik pertanahan yang selama ini terjadi sekaligus mengeliminir potensi

konflik pertanahan di kemudian hari,” ujar Zainun pada Forum Legislasi di Pressroom, Gedung Nusantara III, Selasa (30/4)

Namun, ia juga mengusulkan agar dibentuk Kementerian atau Komisi yang secara khusus menangani penyelesaian konflik pertanahan atau agraria. Ia menilai, selama ini konflik pertanahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) banyak yang belum terselesaikan dan malah menambah konflik baru.

“Saya pesimis RUU Pertanahan ini akan selesai dan mampu menyelesaikan seluruh konflik pertanahan, karena terkait UU sektoral lainnya. Seperti kehutanan, perkebunan, tambang, sumber daya alam. Untuk

itu diperlukan kementerian agraria dan atau komisi khusus yang memiliki otoritas kewenangan tanah, tanpa harus ke pengadilan. Tapi sekarang kita fokuskan dulu di tanah untuk ke depan lebih ada penyempurnaan lagi,” tandas Zainun.

Anggota Panja RUU Pertanahan ini mencontohkan, konflik tanah yang menumpuk di BPN, meski Kepala BPN telah mendapat instruksi resmi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk pendistribusian tanah dan menyelesaikan konflik tanah dengan membentuk tim sebelas, namun konflik terus bertambah dan tak terselesaikan.

Zainun menambahkan, pemerintah sudah membahas RUU Pertanahan sejak tahun 2000. Namun tak pernah diserahkan ke DPR. Sehingga DPR mengambil inisiatif membuat RUU Pertanahan. Namun, proses lama tersebut belum dapat memberikan jaminan untuk penyelesaian masalah pertanahan, walaupun RUU itu dinilai lebih kompleks dan melibatkan lintas komisi.

“Saat ini Komisi II lebih mengutamakan pembahasan RUU Pertanahan, karena merupakan salah satu bidang tugasnya. Sedangkan untuk membuat RUU Pokok Agraria harus melibatkan lintas komisi, seperti Komisi IV karena terkait kehutanan, atau Komisi I karena banyak lahan juga yang bermasalah dengan TNI,” ujar Zainun. (sf) Foto: wy/parle.

Saatnya Sistem Pendidikan Ditata Ulang Dengan Revisi UU Sisdiknas



Anggota Komisi X DPR Zulfadhli.

Anggota Komisi X DPR Zulfadhli menegaskan, sudah saatnya sistem pendidikan ditata ulang, karena dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan zaman sekarang dan tantangan ke depan. “Harus ditata ulang baik dari sisi filosofi pendidikannya, tata kelolanya dan masalah lain yang bertalian dengan dunia pendidikan. Konsekuensinya, UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdik-

nas) sudah saatnya direvisi,” katanya kepada Parlemen di Gedung DPR, Selasa (30/4).

Menurutnya, dengan revisi UU Sisdiknas tersebut maka diharapkan pendidikan akan makin tertata dengan baik. Dengan penataan itu maka bisa dihindari terjadinya karut-marut ujian nasional (UN) tahun 2013 dengan berbagai dampaknya. Selain itu masalah desentralisasi, anggaran kebanyakan dari pusat, tetapi kewenangan di daerah, termasuk masalah guru sebaiknya sentralisasi pengaturan dan pembinaannya di pusat.

Sekarang ini kata Zulfadhli, anggaran kesejahterannya dari pusat, tetapi pengaturannya di daerah sehingga banyak guru yang tidak diberdayakan dengan baik bahkan ada guru jadi camat, guru dipindah-pindah. “Ini juga harus dibenahi,” sambungnya.

Menyinggung masalah mutu pendidikan, politisi Partai Golkar ini mengatakan, merosotnya mutu pendidikan sebagai akibat kelambanan kita membenahi sistem pendidikan. Akhirnya sudah kita rasakan, dulu banyak

mahasiswa Malaysia yang belajar ke Indonesia, namun sekarang kebalikannya mahasiswa Indonesia yang belajar ke Malaysia. Artinya kita lamban dan sudah tertinggal, mereka jauh lebih cepat menata sistem pendidikannya.

“Penataan sistem pendidikan mutlak segera dilakukan, kalau tidak kita akan semakin ketinggalan,” jelasnya.

Ketika ditanya mengenai rencana penerapan Kurikulum baru yang akan diberlakukan bulan Juli mendatang, Zulfadhli mengatakan pesimis bisa diimplementasikan. “Saya meragukan dengan pelatihan guru yang singkat hanya seminggu atau 52 jam. Hasil pelatihan singkat ini apakah guru benar-benar siap melaksanakan tugas mengajar kurikulum baru,” tanya dia.

Dengan Kurikulum baru nanti semestinya tidak perlu lagi digelar Ujian Nasional (UN). “Biarkan saja sekolah yang menentukan karena standar kompetensinya sudah baik, yang penting kontrol pemerintah serta meningkatkan mutu guru,” demikian Zulfadhli. (mp)foto:wahyu/parle

Kasus Susno karena *Integrated Criminal Justice System*, Kacau



Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari.

Anggota Komisi III DPR RI Eva Kusuma Sundari menyatakan prihatin atas penetapan buron kepada mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen (Purn) Susno Duadji. Ia menilai kasus ini bukan sekedar persoalan eksekusi kejaksaan tetapi lebih jauh menyangkut kacaunya *integrated criminal justice system*.

“MA putusannya tidak mengikuti KUHP, Kejaksaan tidak konsisten, Polri juga *double standard*. Ini harus jadi introspeksi bagi pemerintah, MA bagaimana pelaksanaan *integrated criminal justice system* kita yang kacau,” katanya saat dihubungi di Manado, Senin (29/4/13).

Ia menyebut dapat memahami penolakan Susno terhadap upaya eksekusi yang berawal dari putusan MA yang tidak sempurna. Tindak lanjut putusan ini terkesan dipaksakan oleh kejaksaan yang dalam kasus lain terlihat lamban.

“Banyak putusan MA yang berkaitan dengan kewajiban Menkeu untuk membayar nasabah yang menang perkara di MA tetapi tidak ditindaklanjuti kejaksaan. Berarti Jaksa-kannya tidak konsisten,” lanjutnya.

Lebih jauh Eva berpendapat untuk menyetarakan perlakuan terhadap buron yang lain maka aparat penegak hukum wajib menangkap Susno. Kejaksaan dapat meminta bantuan kepada Kemenkumham untuk melakukan

pencekalan dan apabila melarikan diri ke luar negeri bisa bekerja sama dengan Interpol.

Proses eksekusi Susno merupakan tindak lanjut peno-lakan kasasi oleh Mahkamah Agung. Bagi jaksa dengan putusan itu, Susno harus di-bui sesuai vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 3 tahun 6 bulan pada kasus korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat. (iky) Foto: wy/parle.

Komisi X DPR Bentuk Panja Evaluasi UN 2013



Raker Komisi X DPR dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin Ketua Komisi X Agus Hermanto.

Komisi X DPR dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) Evaluasi Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2013. Pembentukan Panja ini dalam rangka evaluasi pelaksanaan UN tahun 2013, dan landasan pengam-bilan kebijakan UN tahun 2014.

Demikian salah satu kesimpulan raker Komisi X DPR yang dipimpin Ketua Komisi Agus Hermanto dan Mendikbud M. Nuh di gedung DPR Jumat (26/4) malam. Rapat kerja yang memfokuskan pada pelaksanaan UN Tahun 2013 dimulai pada pukul 14.30, namun kare-

na banyaknya anggota yang mengajukan pertanyaan seputar kisruhnya UN 2013 akhirnya molor hingga pukul 00.30 termasuk alotnya memutuskan kesimpulan rapat.

Dalam raker ini sejumlah anggota mempertanyakan terlambatnya distribusi materi UN sehingga di 11 provinsi mengalami penundaan. Dampak dari tidak serentak pelaksanaannya UN ini tidak hanya pada siswa, tetapi juga para guru serta orang tua, karena itu diusulkan dibentuknya Panja Evaluasi UN 2013. Anggota FPG Zulfadhli meng-harapkan Komisi X untuk membentuk

Panja Evaluasi UN 2013 dan akhirnya menjadi salah satu kesimpulan raker.

Kesimpulan lainnya Komisi X menyela-kan pelaksanaan UN tingkat SMA dan sederajat tahun 2013 yang tidak dilaksanakan secara serentak di selu-ruh daerah sehingga berpotensi melah-irkan ketidakadilan dan memberikan dampak psikologis terhadap peserta ujian dan implikasi anggaran.

Sedangkan kesimpulan menyangkut hasil UN SMA dan sederajat tahun 2013 yang akan dijadikan sebagai syarat kelulusan dan persyaratan masuk PTN perlu dipertimbangkan kembali dengan kajian mendalam, mendapat catatan dua fraksi FPKS dan FPP.

Fraksi PKS berpendapat bahwa hasil UN SMA dan sederajat tahun 2013 tidak dapat dijadikan syarat kelulusan dan persyaratan masuk PTN. Sementara F-PPP berpendapat masih memerlukan waktu untuk mengambil keputusan karena UN tidak sesuai dengan pera-turan perundang-undangan.

Kesimpulan raker selanjutnya adalah Komisi X DPR RI mendesak Mendikbud RI untuk melakukan evalu-asi secara menyeluruh dan mengambil langkah tegas terhadap pengambil ke-bijakan, pelaksana, dan pengawasan pengadaan dan distribusi naskah UN 2013. Mendikbud juga diminta segera menyelesaikan investigasi proses pelaksanaan pengadaan naskah UN tahun 2013 dan menyerahkan hasil in-vestigasi tersebut secara resmi kepada Komisi X. (mp,sf) foto:wahyu/parle

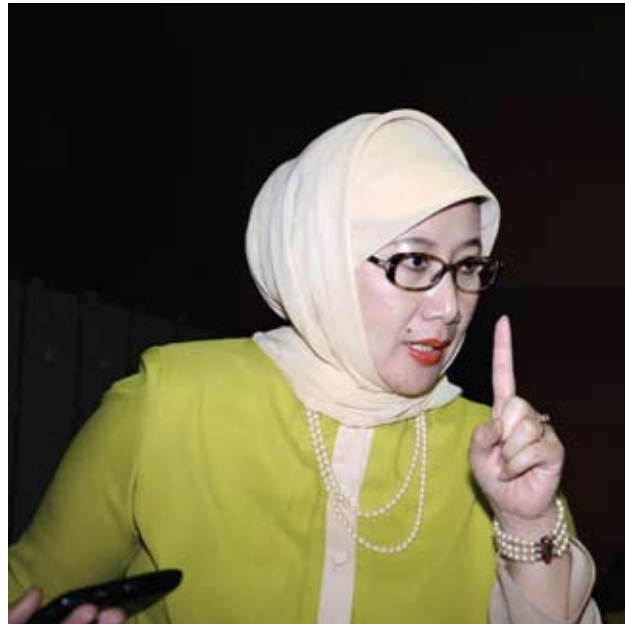
DPR Pertanyakan Keabsahan UN 2013

Anggota Komisi X Reni Marlinawati mempertanyakan keabsahan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013. Ia melihat proses penyelenggaraan UN SMA dan sederajat tahun 2013 banyak melanggar aturan.

“Absahkah UN tahun ini jika merujuk pada proses penyelenggaraannya? Banyak peraturan kementerian dalam Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang nyaris tidak jalan,” tandas Reni ketika rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jumat (26/4).

Politisi PPP ini menyatakan salah satu peraturan yang melanggar Peraturan BSNP nomor 0020/P/BSNP/I/2013 yang mengatur tentang ketentuan teknis dan operasional yang terkait pelaksanaan UN, yakni serentak, jujur dan berkeadilan. Fakta di lapangan, UN berjalan dalam waktu yang berbeda.

Ia juga mengingatkan Mendikbud



Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati.

untuk menelaah Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 57 dan 58. Dalam UU ini disebutkan bahwa evaluasi terhadap peserta didik dan lembaga dilakukan oleh pendidik, bukan oleh pemerintah.

Selain itu seharusnya BSNP yang berwenang melakukan UN, tapi pada prakteknya dilakukan oleh pemerintah, sementara BSNP hanya sebagai validasi soal dan pengawas.

“Berdasarkan UU itu, maka itu yang menjadi dasar kami pada 2010 untuk merumuskan bahwa UN bukan merupakan pemeta kelulusan, namun hanya salah satu faktor penentu kelulusan. Maka dalam hal ini, saya melihat ada pelanggaran pada pasal 57 dan 58,” tegas Reni.

Ia memastikan, ujian nasional tahun ini tidak sah secara hukum. Ia juga meminta agar segera diambil langkah-langkah penting. Jika hasil UN SMA dan sederajat tahun 2013 tetap dipaksakan sebagai acuan utama kelulusan, Reni secara tegas akan melakukan gugatan lewat jalur hukum. (sf, mp) foto:od/parle

Siswono: Ada Sistem Nilai yang Salah



Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Siswono Yudo Husodo.

Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR RI Siswono Yudo Husodo melihat ada sistem nilai yang salah di tengah masyarakat kita menyangkut kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan pejabat publik. Harusnya baik para anggota DPR atau pejabat penyelenggara negara lainnya mengundurkan diri saja bila sudah tersangkut tindak pidana, apalagi bila terindikasi korupsi.

Adalah ironis ketika anggota DPR yang melanggar hukum atau melanggar kode etik, malah dibela oleh fraksinya atau bahkan oleh partainya sendiri. Sanksi sosial sebenarnya lebih tepat untuk menghukum para pejabat publik termasuk anggota DPR.

“Saya lebih condong memperkuat sanksi sosial di masyarakat. Sementara di masyarakat kita sanksi sosial begitu rendahnya. Koruptor yang dermawan lebih dihormati di masyarakat. Jadi, ada sistem nilai yang salah,” katanya saat ditemui Parlemen baru-baru ini di ruang kerjanya.

Anggota F-PG itu mengatakan, BK DPR yang mengawasi

perilaku etik para anggota DPR sebenarnya tidak perlu bekerja keras bila sanksi sosial ini berjalan efektif. “Sebenarnya di negara-negara yang sudah beradab, tidak diperlukan ada BK. Di Inggris dan Amerika, BK itu praktis tidak bekerja, karena yang menghukum seorang politisi adalah dirinya sendiri. Apakah dia anggota DPR, menteri, gubernur, atau bupati. Kalau dia melakukan penyimpangan atau yang tidak patut dia sendiri mengundurkan diri.” katanya.

Kalau pun dia tidak mau mengundurkan diri, lanjut Siswono, mestinya fraksi atau partainya yang menghukum. Siswono lalu mencontohkan, Presiden Korsel langsung

mengasingkan diri setelah ketahuan berperilaku tidak patut. Di negara-negara Eropa menteri yang ketahuan selingkuh langsung mengundurkan diri. Baru-baru ini Direktur CIA terlibat skandal juga langsung mengundurkan diri.

Di Indonesia, tambahnya, seorang koruptor keluar dari pengadilan masih bisa tertawa dan melambaikan tangan. Di luar negeri malu dan menutup dirinya. Dan politisi-politisi yang korup selalu mau membelokkan kriminal pidana korupsi ke masalah politik dengan segala cara dan kelihaiannya. (mh) foto: od/parle

DPR Minta Presiden SBY Tegur Sekab Dipo Alam



Anggota Komisi X DPR Zulfadhli.

Sejumlah anggota Komisi X DPR melontarkan kritik pedas atas pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam bahwa Komisi X diam menyikapi kisruhnya pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Dipo juga menyatakan Komisi X biasanya galak kali ini diam karena terkait pemilu 2014.

“Pernyataan Dipo Alam jelas melecehkan DPR. Saya minta

Pak Agus Hermanto selaku Ketua Komisi X dan sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, menyampaikan kepada Presiden SBY yang juga Ketua Umum Demokrat untuk menegur Bapak Dipo Alam,” tandas anggota Komisi X DPR Zulfadhli saat raker dengan Mendikbud M. Nuh di Gedung Nusantara I Senayan, Jakarta, Jumat (26/4).

Senada dengan Zulfadhli, anggota Komisi X DPR dari FPP Reni Marlinawati juga meminta Dipo tidak memperkeruh keadaan. Apalagi, pemerintahan SBY berusia setahun lagi dengan banyaknya tugas yang belum terlaksana.

“Saya mengharapkan Komisi X menyampaikan surat protes keras kepada Presiden RI atas pernyataan Dipo Alam. Pernyataan Dipo mengandung fitnah karena menyatakan Komisi X tidak bekerja. Pernyataan itu tidak benar,” ujarnya.

Sementara, Anggota Komisi X dari Fraksi PAN Eko Hendro Purnomo yang akrab disapa Eko “Patrio” menilai sikap Dipo berlebihan. Dia juga mendesak Pimpinan Komisi X untuk mengirim surat protes kepada Presiden SBY.

Sebelumnya, Ketua Komisi X Agus Hermanto membantah bila Komisi X diam dan tidak bekerja terkait dengan kisruhnya UN. “Pak Menteri, Komisi X merencanakan pertemuan raker sudah sejak Kamis lalu, namun karena kesibukannya, raker baru digelar pada Jumat siang ini,” tukas Agus menambahkan. (mp) foto:odji/parle

Wakil Ketua DPR Harapkan Ada Pengaturan Kuota BBM

Wakil Ketua DPR Sohibul Iman mengingatkan kementerian terkait untuk melakukan pengaturan yang tepat, agar kuota Bahan Bakar Minyak (BBM)

tidak merugikan rakyat. Dikhawatirkan, jika tidak ada pengaturan, kuota BBM terus membengkak.

“Soal BBM sudah dibahas di Sekretariat Gabungan (Setgab) pada 2010 lalu. Kesepakatan saat itu adalah perlunya dilakukan pengaturan, agar



Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman didampingi Anggota Komisi VII DPR Effendi Simbolon dalam acara Dialektika Demokrasi.

kuota BBM tidak terus membengkak,” jelas Wakil Ketua DPR Sohibul Iman, di acara Dialektika Demokrasi bertajuk “Dua Harga, SPBU Kacau”, Gedung Nusantara III, Kamis (25/4).

Politisi PKS ini menyayangkan pemerintah tidak memberikan kejelasan bagaimana sistem dan cara pengendalian BBM. Namun, pada akhir tahun 2011 malah mengumumkan akan me-

naikkan harga BBM.

Ia menambahkan, jika pemerintah tetap memaksakan untuk menaikkan, ia dan fraksinya merekomendasikan kebijakan pemilahan sekaligus pemihakan (*discriminative and affirmative policy*). Artinya, melalui skema BBM Bersubsidi dua harga (*dual price*), Rp 6.500/ liter untuk mobil pribadi, sementara kendaraan umum, angkutan pedesaan, kendaraan barang atau usaha kecil menengah, dan motor tetap seharga Rp 4.500/ liter.

Namun, Sohibul tetap merasa khawatir dengan kebijakan dua harga tersebut. Ia khawatir persiapan dari pemerintah untuk melaksanakan kebijakan masih kurang matang. Kebijakan ini harus didukung oleh sarana pendukung supaya berdampak positif terhadap rakyat.

“Itu karena tidak mengikuti saran dari kami dalam sistem teknologi pendukungnya. Sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan aspek masalah lain dalam implementasinya,” ujar Sohibul. (sf), foto : wahyu/parle/hr.

BK Rekomendasikan Perbaikan Kode Etik

Produk sanksi yang dihasilkan Badan Kehormatan (BK) DPR RI dinilai tidak menggigit dan tidak memiliki efek jera. Selama ini produk sanksi BK tidak bisa keluar dari UU No.27/2009 tentang MD3, Peraturan DPR RI No.1/2009 mengenai Tatib, Peraturan DPR RI No.1/2010 tentang Kode Etik, dan Peraturan DPR RI No.2/2010 mengenai Tata Beracara BK. Untuk itu, BK telah merekomendasikan perbaikan kode etik dan tata beracara BK, agar menghasilkan produk sanksi yang lebih tegas.

Demikian disampaikan Wakil Ketua BK Siswono Yudo Husodo (F-PG), kepada Parleментарia baru-baru ini. Rekomendasi itu diharapkan segera diproses dan sekarang sudah berada di Badan Legislatif (Baleg). “Memang aturan-aturan yang mengatur sanksi menurut saya terlalu ringan. Tetapi, Badan Kehormatan tidak bisa keluar dari peraturan yang ada,” tandas Siswono. “Kita berharap revisi UU

No.27/2009 yang sedang diproses akan memberikan sanksi yang lebih berat,” lanjut Siswono lagi.

Menurut Siswono, menghukum para politisi itu paling sulit. Mereka itu pandai bicara, berargumen, dan lihai. Apalagi, bila mereka *confidence* dan punya *back up*. Contohnya, menurut aturan BK, anggota yang tidak hadir dalam rapat selama 6 kali berturut-turut sudah bisa dipanggil ke BK untuk diberikan sanksi. Tapi, yang terjadi, mereka membolos 5 kali berturut-turut, lalu masuk untuk mengikuti rapat 1 kali, terus membolos lagi selama 5 kali berturut-turut. Ini jadi dilema.

Belum lagi, para politisi yang tersangkut pidana korupsi. Mereka hanya bisa diberhentikan sementara dan belum bisa diberhentikan secara permanen bila belum ada kekuatan hukum tetap. Ini tentu makan waktu, karena biasanya terpidana korupsi akan banding



Wakil Ketua BK Siswono Yudo Husodo.

dan kasasi, bahkan PK untuk memperlamat keluarnya sanksi pemecatan. Ini jadi dilema lainnya. Siswono yang juga Anggota Komisi IV DPR RI itu, menyadari betul keluhan dan kritik masyarakat atas produk sanksi BK dan lamanya proses pemberian sanksi.

Sampai saat ini, ungkap Siswono, BK sebenarnya telah banyak mengeluarkan sanksi. Data yang ada di BK menyebutkan, 2 orang diberhentikan, 7 orang diberhentikan sementara, 2 orang dilarang menjadi pimpinan alat kelengkapan dewan, 6 orang dipindah dari alat kelengkapan dewan, 3 orang

mendapat teguran lisan, dan 5 orang mendapat teguran tertulis.

Dan yang menarik ada 6 orang yang mengundurkan diri selama dalam proses pemeriksaan BK. 6 orang tersebut sebenarnya mungkin sudah tahu akan dipecat sebagai anggota

DPR RI, tapi kemudian mengundurkan diri, karena khawatir citranya akan rusak. "Jadi, lihat-lihai orang politisi ini. Kalau diberhentikan, kan, beda karena ini menyangkut pencitraan." (mh), foto: *odjie/parle/hr.*

Komisi VII Minta PT Vale Lepas Lahan "Nganggur"



Anggota Komisi VII DPR Irvansyah.

Komisi VII DPR RI meminta perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Morowali, PT Vale Indonesia agar melepas lahan yang belum dimanfaatkan dan memberikan lahan itu kepada Pemerintah Kabupaten Morowali.

"Jangan tunggu hingga 2025 baru diberikan. Nanti pemerintah akan panggil investor untuk memanfaatkan lahan itu," kata Irvansyah (F-PDIP) dalam pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Morowali dengan PT Vale Indonesia yang dimediasi Komisi VII DPR RI di Palu, Sulawesi Tengah, baru-baru ini.

Tahun 2025 adalah berakhirnya masa kontrak karya PT Vale Indonesia di Tanah Air. Kontrak perusahaan tambang tersebut telah berlangsung sejak tahun 1968.

Saat ini jumlah lahan menganggur dan masih dikuasai PT Vale Indonesia luasnya mencapai 36 ribu hektare tersebar di sejumlah blok di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Secara keseluruhan PT Vale Indonesia beroperasi di lahan seluas 190 ribu hektar tersebar di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tengah.

gara.

Sementara itu, Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VII ke Sulawesi Tengah lainnya, Mulyadi (F-Gerindra) meminta PT Vale Indonesia memegang teguh komitmennya untuk turut membangun daerah di sekitar daerah operasi pertambangan.

"Jangan hanya beralih telah menyalurkan CSR (dana tanggung jawab sosial perusahaan). CSR hanya menjadi pembius dan modus investasi," tegas Mulyadi.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Direktur PT Vale Indonesia, Nico Kanter mengatakan pihaknya siap melepas lahan yang belum digarap.

Dia justru mendesak Pemerintah Kabupaten Morowali untuk cepat menunjuk calon investor untuk mengolah lahan menganggur itu. (sc) foto: *sc/parle*

Elektrifikasi Sulawesi Tengah Baru 62 Persen



Tim Kunker Komisi VII DPR dipimpin Ketua Komisi Sutan Bhatogana saat melakukan kunjungan ke Palu, Sulawesi Tengah.

Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola mengatakan, bahwa elektrifikasi di Sulawesi Tengah baru mencapai 62 persen, sehingga masih ada 38 persen masyarakat Sulawesi Tengah yang belum menikmati listrik.

Hal tersebut disampaikan Longki dalam pertemuan dengan Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Sulawesi Tengah yang dipimpin Ketua Komisi VII, Sutan Bhatogana di Palu, Sulawesi Tengah, baru-baru ini.

Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi

VII DPR RI ke Sulawesi Tengah antara lain, Halim Kalla (F-PG), Irvansyah (F-PDIP), Jamaluddin Jafar (F-PAN), Nur Yasin (F-PKB), dan Mulyadi (F-Gerindra).

Longki meminta PT PLN (Persero) untuk mempercepat pembangunan jaringan listrik dari PLTA Sulewana di Kabupaten Poso ke Kota Palu.

Longki mengatakan penanganan jaringan tersebut saat ini sangat lambat sehingga dia menilai PLN melakukan pembiaran atas keterlambatan pembangunan jaringan itu.

“Saya sudah dua kali menyurati Direktur Utama PLN terkait percepatan pembangunan jaringan tersebut,” kata Longki.

Menurutnya, PLN rencananya baru akan menyambung jaringan tersebut

ke sistem kelistrikan di Palu pada November atau akhir tahun 2013.

Longki menyatakan, November masih sangat lama. Dirinya mengusulkan agar elektrifikasi di Sulawesi Tengah bisa naik, menyiasatinya dengan jaringan tegangan rendah melalui Poso.

“Masyarakat di Poso sudah mempertanyakan suplai listrik dari PLTA Sulawesi Tengah yang belum dinikmati masyarakat, padahal PLTA tersebut sudah beroperasi,” terangnya.

Menanggapi penjelasan Gubernur Sulawesi Tengah tersebut, Direktur Operasi Indonesia Timur PT PLN yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, Vickner Sinaga mengatakan PLN sudah merencanakan penyambungan jaringan 10 megawatt dari PLTA Sulewana ke jaringan listrik Poso April 2013.

Sementara jaringan dari PLTA Sulewana ke sistem kelistrikan Palu 84 megawatt baru akan dilakukan November 2013. “Suplai 84 megawatt tersebut akan menjadi cadangan listrik di Palu,” kata Vickner Sinaga.

Vickner Sinaga meminta instansi terkait agar berperan untuk memuluskan pembangunan jaringan karena pembangunan tersebut akan menimbulkan masalah sosial di masyarakat.

Vickner Sinaga mengatakan listrik di Sulawesi Tengah masih kurang dibanding cadangan listrik di Jawa dan Bali. Dia mengatakan elektrifikasi di Sulawesi Tengah sudah mengalami kenaikan dari sebelumnya baru 62 persen, saat ini naik menjadi 66%. (sc) foto:sc/parle

Komisi VII Pertanyakan Pengelolaan Limbah PLTU Riau

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap - PLTU Riau yang menggunakan batu bara sebagai sumber energi diminta sejak awal memperhatikan masalah pengelolaan limbah. Pasalnya pembangkit listrik dengan kapasitas 2x110 MW ini diperkirakan akan mengkonsumsi batu bara mencapai 3300 ton/hari.

“Kita mencatat kebutuhan batu bara perhari 3300 ton, berarti setahun bisa mencapai 1 juta ton lebih. Ini kepikiran oleh saya limbahnya mau dibawa kemana, mau dibuang ke sungai Siak atau dibikin apa?” tanya anggota Tim Kunker Komisi VII Sutan Sukarnotomo saat berkunjung ke PLTU Riau di Kecamatan Tenayanraya, Kota Pekanbaru, Riau, baru-baru ini.

Ia juga menyampaikan harapan agar kehadiran PLTU yang diproyeksikan



Tim Kunker Komisi VII DPR saat berkunjung ke PLTU Riau di Kecamatan Tenayanraya, Kota Pekanbaru.

selesai pada tahun 2014 dapat menekan pemakaian BBM PT. PLN yang mencapai 85 persen. Pada bagian lain anggota Komisi VII dari Dapil Riau I ini juga meminta penjelasan penanganan proyek yang berada di lokasi lahan gambut ini.

Menjawab hal ini Direktur Konstruksi dan Energi Baru/Terbarukan PT. PLN

Nasri Sembayang menjelaskan PLTU Riau menggunakan *Circulating Fluidized Bed Boiler* - CFB yang lebih bersahabat dengan lingkungan.

“Pembakaran juga lebih sempurna, sehingga batubara tidak ada lagi yang tidak terbakar. Jenis lain biasanya ada 1 persen batu bara yang tidak terbakar. Disalurkan keluar juga dilengkapi penangkap abu, jadi 99,9 persen abu bisa tertangkap?” imbuhnya. Abu sisa batu bara ini akan diolah untuk bahan batako bekerja sama dengan penduduk setempat.

Nasri membenarkan proyek ini dibangun di lahan gambut yang disiasati dengan teknologi lapisan karpet khusus yang dengan luas mencapai 10 hektar. Penanganannya telah memperoleh amdal dari Dinas Lingkungan Hidup setempat. (iky)

Belajar Asuransi, Komisi XI Timba Ilmu ke Inggris dan Amerika



Wakil Ketua Komisi XI DPR Andi Timo Pangerang.

Wakil Ketua Komisi XI Andi Timo Pangerang memastikan untuk pembahasan mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) Perasuransian, Komisi XI akan melakukan studi banding ke Amerika Serikat dan Inggris. Menurutnya, Amerika Serikat dan Inggris merupakan dua negara terbaik untuk belajar mengenai asuransi.

Direncanakan, studi banding ke Amerika Serikat akan dilaksanakan pada 4-10 Mei esok, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis, sedangkan tim Komisi XI akan bertolak ke Inggris pada 20 Mei esok, diketuai oleh Andi Timo.

“Komisi XI kesana (Amerika Serikat dan Inggris) dalam rangka membahas RUU perasuransian. Alasan kenapa ke Inggris, seperti yang kita ketahui karena Inggris itu negara yang merepresentasikan kondisi industri asuransi yang maju dan mapan. Industri asuransi di sana sudah ada sejak 3,5 abad yang lalu, tentunya mereka lebih familiar terhadap asuransi,” jelas Andi ketika ditemui di Sekretariat Komisi XI, Gedung Nusantara I, Kamis (2/5).

Politisi Demokrat ini menilai Inggris adalah negara yang kuat dalam membina dan menjaga hubungan perdagangan dengan Eropa dan Amerika. Selain itu, di sana juga terdapat perusahaan asuransi pertama dan menjadi leader untuk asuransi jiwa, yaitu Lloyds.

Selain ke Lloyds, Komisi XI juga akan mengunjungi ke Kementerian Keuangan dan Parlemen Inggris, termasuk juga ke Otoritas Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Inggris. Karena asosiasi bidang perasuransian juga penting, Komisi XI akan menemui beberapa asosiasi, diantaranya *Association British Insurance (ABI)* dan *British Insurance Broker's Association (BIBA)*.

Berdasarkan data dari sekretariat, untuk studi banding ke Amerika Serikat, Komisi XI akan mengunjungi *California Department of Insurance*, *California Health and Life Insurance Guarantee*, *California Commission Insurance*, dan perusahaan asuransi.

“Jadi, nanti kita akan belajar mengatur penjaminan pemegang polis. Kita juga akan belajar mengenai mekanisme, cara pengajuan dan pola penjaminan, termasuk juga bagaimana cara mendirikan perusahaan asuransi,” jelas Andi. (sf) Foto: doc/parle.

DPR Dukung Pembangunan Stadion Barombong, Makassar



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Syamsul Bachri menyampaikan sambutan dalam pertemuan dengan jajaran Pemprov. Sulawesi Selatan.

Pembangunan stadion Barombong di Makassar Sulawesi Selatan mendapat dukungan dari DPR RI. Baru baru

ini Komisi X DPR RI berjanji akan memperjuangkan dana dari pemerintah dalam Anggaran Pendapatan Belanja

Negara (APBN).

Sebelumnya pembangunan Stadion Barombong berkapasitas 50 ribu penonton tersebut sempat di khawatirkan terhambat, setelah Menteri Pemuda dan Olahraga yang telah berkunjung ke Makassar mengatakan tidak bisa menambah anggaran untuk membantu stadion tersebut.

Namun menurut wakil Ketua Komisi X DPR RI Syamsul Bachri pernyataan ini bukan berarti pembangunan Stadion Barombong gagal, Komisi X akan memperjuangkan dan mendukung sepenuhnya pembangunan dan pembiayaan dari negara.

“Mungkin, waktu itu Pak Menteri mengatakan untuk APBN 2013, tidak



ada karena anggaran sudah turun , Namun masih bisa diusulkan untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara – Perubahan atau di APBN 2014 mendatang. Jadi masih bisa diperjuangkan, fungsi anggaran ada di DPR” ujar Syamsul.

Stadion Barombong ini diharapkan

menjadi pilar utama pembangunan olahraga di kawasan timur. “Kita di sini membangun dengan kekhasan, yaitu stadion di tepi laut, dengan kolam renang yang berbatasan langsung dengan laut, dengan desain yang indah. Jadi jangan dihentikan, supaya kawasan timur ini bisa menjadi penyelenggara PON ke depan” ujar Gubernur

Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo.

Stadion Barombong diperkirakan akan menghabiskan anggaran RP 260 Milliar dari APBN dan APBD. Di Tahun 2013 ini, Pemprov Sulsel menganggarkan Rp 3 Milliar untuk pembangunan selanjutnya. (ray)

DPR Pamerkan Risalah Rapat tahun 1950



Perpustakaan DPR RI.

Perpustakaan DPR RI akan memamerkan sejumlah koleksi penting yang merupakan bagian dari sejarah perkembangan demokratisasi di republik ini. Salah satu yang diperkirakan akan menarik perhatian publik adalah Risalah Rapat DPR tahun 1950.

“Ini buku penting yang jarang ditampilkan apalagi sudah tua, jadi publik silahkan melihat, mempelajari sendiri,” kata Kepala Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data Informasi Setjen DPR RI Damayanti di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/5/13).

Koleksi ini akan ditampilkan di stand pameran

Perpustakaan DPR RI dalam rangka HUT Perpustakaan Nasional RI ke-33. Acara yang dilaksanakan tanggal 13-17 Mei 2013 ini, dipusatkan di koridor dan halaman Perpustakaan Nasional Jalan Salemba Raya no.28A Jakarta Pusat.

Kabid Perpustakaan DPR Mohammad Djazuli menambahkan dalam pameran juga akan ditampilkan catatan pembahasan sejumlah RUU. Ini akan membuka mata publik bahwa untuk mengesahkan sebuah produk legislasi bukan perkara mudah, perlu perdebatan panjang sebelum diputuskan di rapat paripurna.

Koleksi lama lain yang akan ditampilkan adalah Staatsblad atau lembaran negara era kolonial Belanda diantaranya produk tahun 1847, 1877 dan 1879. “Ini kesempatan baik bagi publik untuk berinteraksi langsung dengan perpustakaan parlemen yang pasti punya kekhasan tersendiri,” demikian Djazuli. (iky)

Usai Reses, Komisi XI Fit & Proper Test Calon Anggota BPK

Berdasarkan data dari Sekretariat, Komisi XI sudah menerima 22 calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pengganti Taufiequrrachman Ruki yang akan pensiun pada bulan Mei ini. Direncanakan, setelah reses Komisi XI akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).

“Setelah masa reses ini ada beberapa concern yang segera harus kita kerjakan. Diantaranya fit and proper test anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI), kemudian fit and proper test calon anggota BPK untuk menggantikan Taufiequrrachman Ruki, serta pembahasan APBN-P dan APBN 2014,” jelas Wakil Ketua Komisi XI Andi Timo Pangerang ketika ditemui Tim Parle, di Sekretariat Komisi XI, Gedung

Nusantara I, Kamis (2/5).

Andi menyatakan bahwa saat ini daftar nama calon anggota BPK sudah disampaikan ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk dilakukan fit and proper test. Setelah itu, DPD akan menyampaikan hasil fit and proper test kepada Komisi XI, dan akan dilakukan fit and proper test kembali oleh Komisi XI.

“Saya pribadi berharap, anggota BPK yang baru ini dapat bekerja dengan tim anggota BPK yang sudah ada. Mereka juga harus memiliki pengalaman dan paham tentang substansi BPK, karena mereka langsung terjun menjalankan tugas,” harap Andi. (sf) Foto: wy/parle.



Wakil Ketua Komisi XI DPR Andi Timo Pangerang.

Komisi VIII Akan Tindaklanjuti Temuan BPK atas Program Bansos



Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sayed Fuad Zakaria.

Dalam laporan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), diketahui ada beberapa ketidaksesuaian atas penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yang dilakukan oleh mitra kerja Komisi VIII. Kementerian Sosial misalnya, ada sembilan temuan yang belum ditindaklanjuti dengan total nilai sekitar 1,7 Miliar.

Salah satunya adalah belum adanya rekonsiliasi antara Kementerian Sosial dengan PT POS terkait dengan pe-

nyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

Sedangkan BNPB ditemukan sekitar 134 temuan dengan 125 ketidaksesuaian yang belum ditindaklanjuti. Salah satunya adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Bantuan Pasca Bencana tahun Anggaran 2010 pada BNPB dan instansi terkait lainnya di Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, Jambi, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara.

“Untuk Kementerian Agama misalnya ada sekitar 16 temuan yang belum ditindaklanjuti, namun ada juga yang sudah ditindaklanjuti bahkan sudah diberikan sanksi baik oleh kementerian yang bersangkutan maupun oleh KPK. Seperti program pengadaan kitab suci Al Quran dan program pengadaan laboratorium komputer yang sudah ditetapkan tersangkanya,” jelas Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sayed Fuad Zakaria.

Ditambahkan Sayed, menanggapi hasil temuan BPK atas ketidaksesuaian program Bansos tersebut, di awal masa persidangan mendatang Komisi VIII akan langsung melakukan rapat kerja dan mengevaluasi temuan tersebut, dengan Kementerian terkait dan mitra kerja Komisi VIII lainnya, termasuk dengan BNPB. Bahkan jika kemudian ada indikasi penyelewengan program bansos, pihaknya tidak akan segan-segan untuk melaporkannya kepada pihak berwajib dan KPK.

“Kita ingin tahu apa temuan-temuan tersebut sudah ditindaklanjuti, bansos itu kemana sarannya, siapa-siapa saja yang menerima bansos tersebut. Jika Bansos itu diberikan pada Pondok Pesantren atau sekolah mana, maka Pondok pesantren mana saja yang menerima bansos tersebut. Hal ini semata-mata agar program yang mulia ini jangan sampai salah sasaran,” tambahnya. (Ayu) Foto: wy/parle.

Komisi XI Tunggu Surat Pembahasan RAPBN-P dari Pemerintah

Wakil Ketua Komisi XI Andi Timo Pangerang menyatakan bahwa saat ini Komisi XI DPR sedang menunggu surat dari pemerintah terkait dengan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013. Setelah pembukaan masa persidangan IV tanggal 13 Mei nanti, baru sidang penyampaian RAPBN-P akan dijadwalkan.

“Saat ini Komisi XI sedang menunggu surat dari pemerintah. Jadi nanti akan masuk ke Paripurna, tapi belum tahu kapan waktunya. Masa Persidangan IV tahun 2012/2013 akan dibuka, pada tanggal 13 Mei 2013 setelah itu rapat Badan Musyawarah yang akan menentukan jadwal,” ujar Andi ketika ditemui Tim Parle di ruang kerjanya, Kamis (2/5).



Wakil Ketua Komisi XI DPR Andi Timo Pangerang.

Sesuai dengan UU Keuangan Negara No 17 Tahun 2003, pemilik kuasa anggaran adalah presiden, dan Presiden boleh menguasakannya kepada Menteri Keuangan (Menkeu) yang definitif. Namun, hingga kini kursi Menkeu masih kosong. Hanya ada Pelaksana

Tugas sementara (Plt) Menkeu yang dirangkap Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

Terkait dengan hal itu, Andi mengaku tidak ada masalah. Ia memperkirakan presiden akan segera mendefinitifkan Menkeu pengganti Agus Martowardojo. Ia yakin pemerintah mengetahui dan paham terkait aturan ini.

Ditemui di tempat terpisah, Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo menyatakan saat ini, pemerintah masih menyiapkan RAPBN-P 2013. Rencananya, rancangan akan diajukan kepada DPR ketika masa reses selesai.

“Begitu DPR kelar masa resesnya pada 15 Mei, maka langsung kami ajukan RAPBNP 2013,” kata Susilo. (sf)

Pramono: Caleg Artis Bisa Dikalalahkan Pengusaha



Wakil Ketua DPR Pramono Anung didampingi Pengamat Politik Tjipta Lesmana dan Caleg PDI Perjuangan Yessy Gusman dalam acara Dialektika Demokrasi.

Fenomena calon anggota legislatif dari kalangan artis terus menjadi topik pembicaraan publik. Nama-nama artis mewarnai Daftar Caleg Sementara (DCS) di sejumlah partai. Pro dan kontra ikut meramaikan pembicaraan di seputar caleg artis. Dan yang menjadi pesaing ketat caleg artis pada pemilu 2014 adalah kalangan pengusaha. Demikian mengemuka dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema “Caleg Artis Mampukah Tingkatkan Kualitas Parlemen?”

Bertempat di *press room* DPR RI, Kamis (5/4) hadir sebagai pembicara adalah Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Tjipta Lesmana, dan Yessy Gusman. Dalam kesempatan itu, Pramono menegaskan, modal sosial yang dimiliki para artis karena popularitasnya di tengah masyarakat justru bisa dikalahkan oleh para pengusaha yang ikut bersaing menjadi caleg pada pemilu

2014 ini. Jadi, modal sosial dikalahkan modal dana.

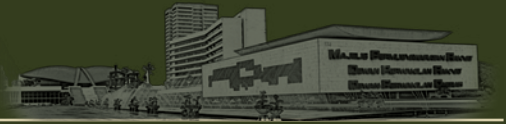
Saat ini, lanjut Pramono, banyak pengusaha yang tidak dikenal masyarakat, tapi punya modal dana untuk berkampanye. Ia lalu mengungkapkan hasil survei pemilu 2009, ternyata kalangan artis hanya mengeluarkan dana Rp 300-500 juta. Aktivis dan politisi mengeluarkan Rp 500-800 juta. Pensiunan TNI/Polri menyedot dana Rp 800-1,7 miliar. Sedangkan pengusaha bisa mengerahkan anggaran kampanye hingga Rp 1,7-6 miliar.

Menurut Pramono, partai politik yang hanya mengandalkan artis semata tanpa bekal dan pengalaman berpolitik menunjukkan ada kemandegan dalam rekrutmen kadernya. Ini menjadi persoalan yang terjadi hampir di semua partai.

Sementara itu bintang film era 1980-an Yessy Gusman yang menjadi bakal caleg dari PDI Perjuangan, mengakui, sudah diingatkan orang-orang terdekatnya untuk berhati-hati terjun ke panggung politik. Masuk partai seperti masuk kandang macan. Yessy sudah berkonsultasi dengan keluarga dan teman dekatnya.

Yessy yang lahir 21 Juli 1962 itu, sudah siap bertarung di pemilu 2014. ia bukan tak menyadari ketatnya pertarungan politik. Setelah terpilih nanti, ia juga akan menghadapi pertarungan di internal fraksinya sendiri.

“Untuk menjadi anggota DPR RI, saya akan berusaha meyakinkan masyarakat dengan hati nurani bukan melalui pendekatan uang. Saya ingin mendidik masyarakat memiliki pola pikir yang didasarkan pada hati nurani,” tandasnya. (mh) Foto: wy/parle.



Ketua DPR Ri Marzuki Alie dan delegasi mengikuti seminar dengan tema “Building A Highway to Indonesia : The Promising Role of Trade-investment and Higher Education Cooperation in enhancing Indonesia-Denmark relations” di Gedung Parlemen Denmark. Selasa (01/05). Foto: Denus.



Kunker Komisi VIII DPR dipimpin Nurul Iman Mustofa memberikan bantuan sosial secara simbolis kepada Gubernur NTT Frans Lebu Raya, NTT. Selasa (16/04). Foto: as/parle



Kunker Komisi VIII DPR dipimpin Nurul Iman Mustofa memberikan bantuan sosial kepada penerima manfaat Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (Aslut) Tahun 2013 di Kabupaten Kupang, NTT. Selasa (16/04). Foto: as/parle



Kunker Komisi X DPR dipimpin Ketua Komisi Agus Hermanto melihat miniatur rencana Stadion Olah Raga di Maluku Utara. Selasa (23/04). Foto: as/parle



Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Makassar dipimpin Syamsul Bachri foto bersama Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Selasa (23/4). Foto: RY